



**RILIS**  
**KUNJUNGAN KERJA (KUNKER) SPESIFIK BIDANG PENDIDIKAN**  
**KOMISI X DPR RI KE KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT**  
**PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024—2025**  
**TANGGAL 20—22 NOVEMBER 2024**

=====

Komisi X DPR RI melakukan Kunker Spesifik Bidang Pendidikan (Evaluasi PPDB Zonasi, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Ujian Nasional) pada tanggal 20—22 November 2024 ke Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Kunker dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP dari Fraksi Partai Golkar Dapil Kalimantan Timur.

Agenda pertama adalah mengunjungi SMPN 1 Kota Bandung, Tim Kunker diterima dengan baik oleh Wakil Kepala Sekolah SMPN 2 Kota Bandung. Agenda kedua, yaitu pertemuan di Kantor Walikota Bandung, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si dari Fraksi Partai Gerindra Dapil DKI Jakarta II. Tim Kunker diterima oleh PJ Walikota Bandung A Koswara, Dinas Pendidikan Kota Bandung, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMB) Provinsi Jawa Barat, Dewan Pendidikan Daerah Kota Bandung, Komite Sekolah di Provinsi Jawa Barat, Kepala Sekolah pada satuan pendidikan di Kota Bandung, dan pemangku kepentingan pendidikan di kota Bandung.

Pada pertemuan tersebut juga hadir pejabat pendamping dan mitra kerja Komisi X DPR RI dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), yaitu Anindito Aditomo, S.Psi., M.Phil., Ph.D. (Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan), dan Dr. Baharudin, S.Pd., M.Pd. (Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus).

Para pemangku kepentingan pendidikan Kota Bandung mengeluhkan adanya beberapa persoalan dalam PPDB Zonasi, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Ujian Nasional. Beberapa Anggota Komisi X DPR RI juga mengungkapkan adanya kecurangan data dalam PPDB zonasi.

Pejabat Kementerian Dikdasmen mengungkapkan adanya fenomena banyaknya sekolah yang terindikasi memperbanyak rombongan belajar (rombel) maupun jumlah siswa per-rombel. Kementerian Dikdasmen telah menerbitkan standar penerimaan sekolah yang membatasi jumlah siswa tiap jenjang, hal ini perlu menjadi pedoman Pemerintah Daerah.

Seluruh masukan yang disampaikan pada forum pertemuan akan menjadi bahan dalam melakukan pembahasan bersama pemerintah pada rapat kerja Komisi X DPR RI yang akan datang.

Bandung, 22 November 2024

Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR RI ke Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.